KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Triwulan II 2024

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Pada tahun anggaran 2024, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Triwulan II tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut untuk triwulan-triwulan berikutnya.

Dalam pengejewantahan kinerja 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 17 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2024 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini kami sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Juli 2024
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo

ISI

KATA PENGANTAR i
ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
Pendahuluan 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
Isu Strategis 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA 4
Kegiatan 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 6
IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik 10
IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik 12
IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik 14
IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan 15
IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan 17
IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti 20
IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 24
IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional 26
IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan 29
IK 10 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 31
IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 32
IK 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 33
IK 13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 34
IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 35
IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 36
IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 37

IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Mendapatkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 38
BAB IV PENUTUP 39
Kesimpulan 39
Saran 39
LAMPIRAN 40
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)..... 2
Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjaku Triwulan II 2024 untuk akun Biro HKLN..... 7
Gambar 3 *Screen capture* aplikasi kinerjaku untuk output kinerja Biro HKLN Triwulan II 2024..... 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan II tahun 2024 2
Tabel 2 Daftar IKU dan besar target Biro HKLN tahun 2024 dan Triwulan II 2024 5
Tabel 3 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan II 2024 6
Tabel 4 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik10
Tabel 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 10
Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik 12
Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 12
Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik 14
Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 14
Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II 2024 15
Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2022 15
Tabel 12 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan... 17
Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 17
Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan II 2024 20
Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 20
Tabel 16 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023 24
Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 24
Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional 26
Tabel 19 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023.... 26
Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan 29
Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 29
Tabel 22 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2023 31
Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 31
Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024 32
Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 32
Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2024 33

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 33
Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan II 2024 34
Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 34
Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024 35
Tabel 31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 35
Tabel 32 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2024 .. 36
Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 36
Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 37
Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023 37
Tabel 36 Realisasi dan Capakan IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Triwulan II 2024 38
Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tw II 2017 s.d. 2023 ... 38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai koordinator dan fasilitator penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana di Peraturan Menteri tersebut turut diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki arti strategis karena secara timbal balik berperan sebagai komunikator dan pengelola hubungan baik secara horizontal yaitu antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *counterpart* dari negara asing mitra Indonesia dan organisasi kerja sama regional dan internasional, maupun secara vertikal dimana Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berfungsi sebagai penjembatan arus infomasi dari Menteri kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masyarakat atau publik luas dan menghimpun permohonan informasi masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dalam merelasikan dan diseminasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan rumusan jajaran pimpinannya kepada publik eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan baik di dalam dan di luar negeri serta kepada publik internal turut memiliki nilai strategis.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada Triwulan II tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dituangkan ke dalam 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Jumlah IKU yang realisasinya dapat diukur pada Triwulan II 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan) IKU yaitu:

1. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
2. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti;
4. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional;
6. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
8. Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; dan
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang merupakan aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN pada triwulan II 2024 adalah 105,81. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi tersebut Biro HKLN memperoleh predikat baik.

BAB I
PENDAHULUAN

Pendahuluan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) Triwulan II Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2024 (tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024). Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan II Tahun 2024 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan II Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit setiap triwulan kepada pengelola kinerja Biro HKLN. Selanjutnya, pengelola kinerja melaporkan pencapaian kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui sistem yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yang dapat diidentifikasi setidaknya adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Terhitung dari tanggal 29 September 2020, struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro HKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Biro HKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

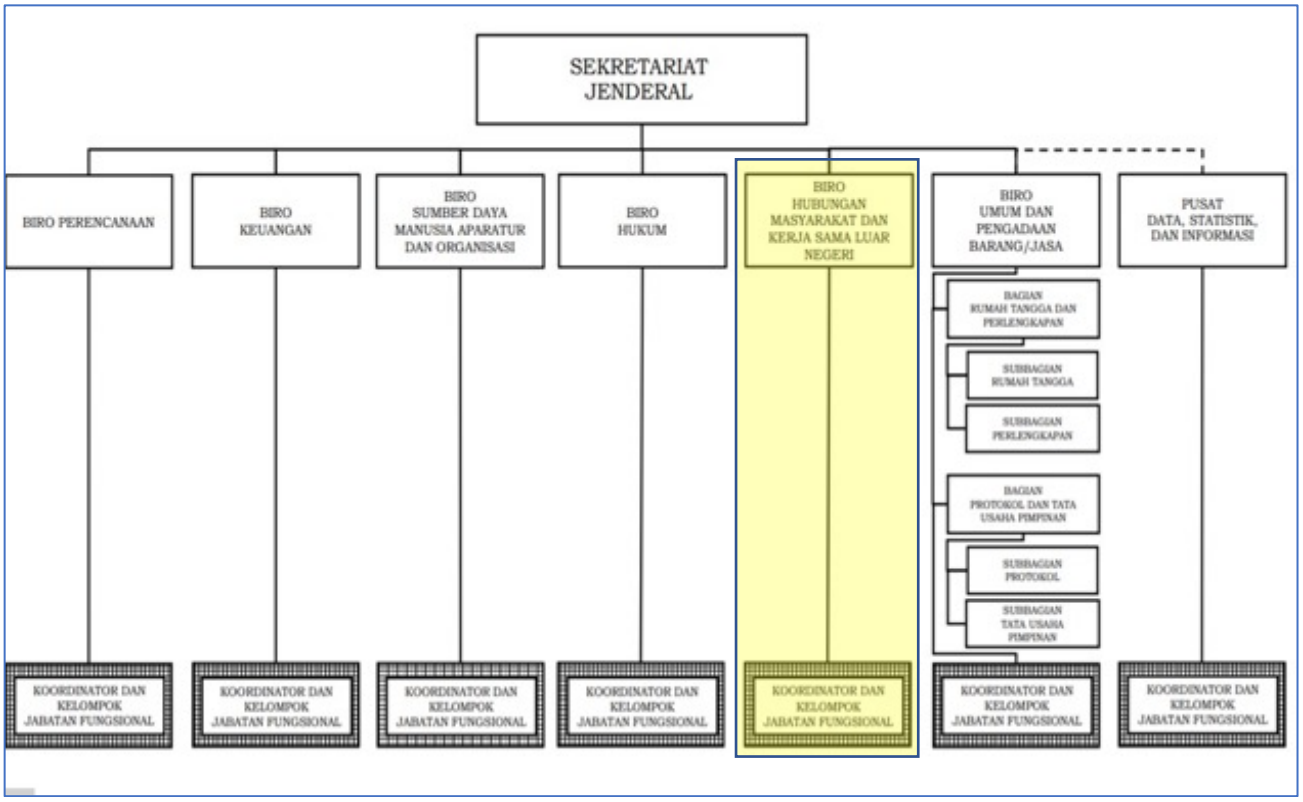

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Triwulan II tahun 2024 berjumlah 85 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Jabatan/Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Pemberitaan dan Opini Publik	30
3	Layanan Informasi Publik	9
4	Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	10
5	Kerja Sama Bilateral	8
6	Kerja Sama Multilateral	9
7	Dukungan Manajerial	16
8	Diperbantukan/dipekerjakan	2
Jumlah		85

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan II tahun 2024

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri melainkan mengadopsi tugas, fungsi, visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan visi dari Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berIKKt:

"Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP".

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, rumusan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (strategic issue) adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Dengan demikian, Biro HKLN menetapkan bahwa isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN. Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi sehingga menjadi fokus perhatian Biro HKLN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy;
2. Citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Pencapaian seluruh program prioritas KKP di tahun 2024 dan kontribusi yang dapat diberikan Biro HKLN; dan
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dan mental serta reformasi birokrasi KKP.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan Biro HKLN (pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri yang efektif), sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri ditindaklanjuti yang efektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau terkadang disebut dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai diantaranya adalah 'Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan'. Dalam melaksanakan kegiatannya, Biro HKLN pada tahun anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 37.486.550.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima lima puluh ribu rupiah).

Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Tahun 2024

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan draih oleh Biro HKLN sebagai suatu hasil seluruh indikator yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan Biro HKLN. Untuk mencapai tujuan Biro HKLN Tahun 2024 maka sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional;
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Guna mencapai sasaran kegiatan di atas maka seluruh sasaran kegiatan tersebut diturunkan dan dimaterialisasi ke dalam bentuk IKU yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif. Hal ini dapat memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja dimana keseluruhannya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja memuat Sasaran Kinerja dan butir-butir IKU merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sekaligus merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Detil IKU Biro HKLN tahun 2024 dan target IKK Triwulan II 2024 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Target Tw II
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	-
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	-
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	-
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	89%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	35%
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	88%
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	35%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	30%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	-
		11	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	80
		12	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	-
		13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	94%
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	-
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	-
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	-

Tabel 2 Daftar IKU dan besar target Biro HKLN tahun 2024 dan Triwulan II 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Sub Koordinator Tata Usaha Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual IKK masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per tanggal …… Juli 2024 dimana berdasarkan hasil penghitungan oleh aplikasi, Nilai Kinerja Biro HKLN Triwulan II tahun 2024 adalah ……..

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	0	-	-
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	0	-	-
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	0	-	-
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	89%	96,08%	107,96%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	88	90,28	102,59%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	35%	76,47%	120%
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	35%	37,14%	106,11%
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	88%	88,89%	101,01%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	30%	33,33%	111,10%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	0	-	-
		11	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	80	81,68	102,10%
		12	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	0	-	-
		13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	94%	116,67%	120%
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%	85,72%	85,72%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	0	-	-
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	0	-	-
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	0	-	-

Tabel 3 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan II 2024

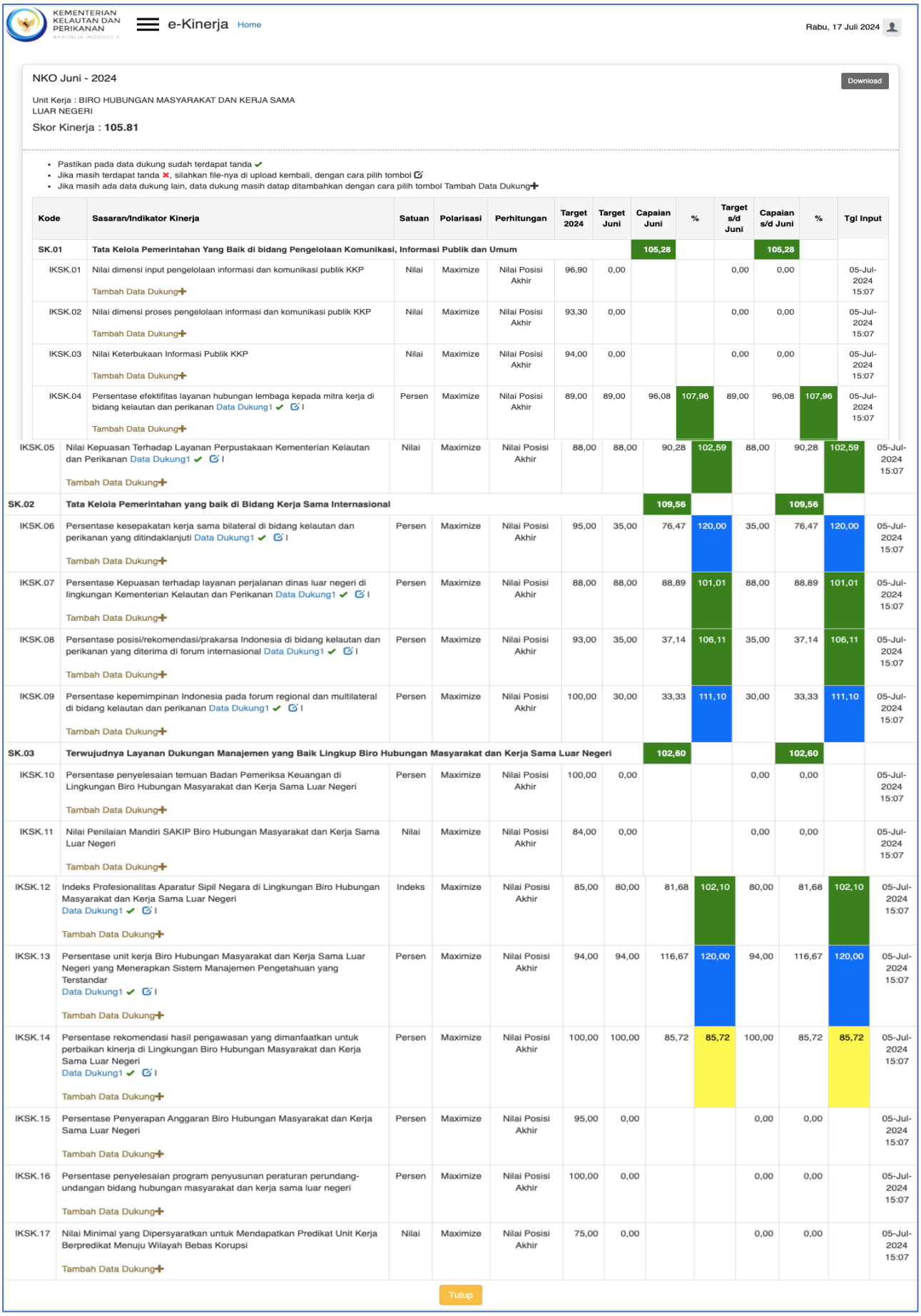

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
SK.01	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum**						**105,28**			**105,28**		
IKSK.01	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,90	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.02	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,30	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.03	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.04	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89,00	89,00	96,08	107,96	89,00	96,08	107,96	05-Jul-2024 15:07
IKSK.05	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	90,28	102,59	88,00	90,28	102,59	05-Jul-2024 15:07
SK.02	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Kerja Sama Internasional**						**109,56**			**109,56**		
IKSK.06	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	35,00	76,47	120,00	35,00	76,47	120,00	05-Jul-2024 15:07
IKSK.07	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	88,89	101,01	88,00	88,89	101,01	05-Jul-2024 15:07
IKSK.08	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	35,00	37,14	106,11	35,00	37,14	106,11	05-Jul-2024 15:07
IKSK.09	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	30,00	33,33	111,10	30,00	33,33	111,10	05-Jul-2024 15:07
SK.03	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri**						**102,60**			**102,60**		
IKSK.10	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.12	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	80,00	81,68	102,10	80,00	81,68	102,10	05-Jul-2024 15:07
IKSK.13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	116,67	120,00	94,00	116,67	120,00	05-Jul-2024 15:07
IKSK.14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1 Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	85,72	85,72	100,00	85,72	85,72	05-Jul-2024 15:07
IKSK.15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07
IKSK.17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		05-Jul-2024 15:07

Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjaku Triwulan II 2024 untuk akun Biro HKLN

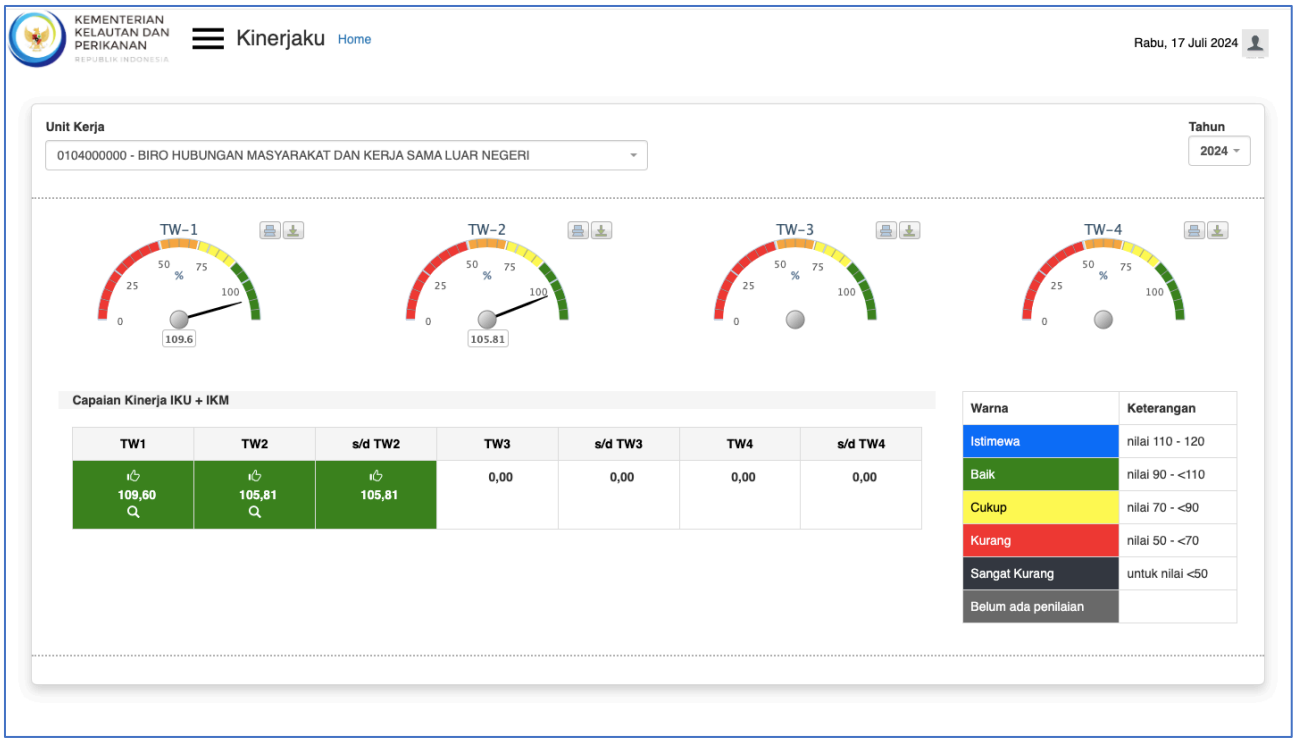

Gambar 3 *Screen capture* aplikasi kinerjaku untuk output kinerja Biro HKLN Triwulan II 2024

Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II tahun 2023;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024);
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) merupakan penjelasan apabila terdapat pemeringkatan yang diterbitkan oleh KL Penilai posisi/peringkat KKP secara nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama Triwulan II tahun 2024;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja/KL maupun instansi dan kembaga terkait;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian; dan
8. Untuk IKK yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di Triwulan II dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK.

9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 memberikan arahan Laporan Kinerja untuk menyediakan sub bab yang isinya menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Oleh karena pada tahun 2024 salah satu IKU yang diamanatkan kepada Biro HKLN adalah 'Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri' dimana substansi laporan untuk IKU setiap triwulan pasti memuat uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, maka dalam rangka efisiensi serta demi menghindarkan *redundancy* informasi, maka dalam Laporan Kinerja ini tidak tersedia sub bab tersendiri membahas realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	nihil	nihil	Belum

Tabel 4 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dimana pada Triwulan II 2024 tidak ditetapkan besar target untuk IKK ini. Sumber informasi besar Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Republik Indonesia. Besar Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

a. Pengelolaan layanan produksi; dan
b. Publikasi produksi video documenter.

Sepanjang triwulan II tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

a. monitoring media sosial dengan **5.618** data di twitter, **1.568** data di instagram, **3.132** data di facebook, **417** data di tiktok, dan **1.080** data di youtube;
b. monitoring media massa dengan **15.140** pemberitaan di media online, **130** pemberitaan di media cetak, dan **59** pemberitaan di media tv;
c. **3** kali konferensi pers
d. **1** kali Bincang Bahari
e. Rilis **19** siaran pers;
f. Produksi **5** episode podcast dan **3** episode KKP News
g. Publikasi konten di media sosial KKP, meliputi:
   Instagram, **214** konten, Tiktok, **64** konten, Twitter, **104** konten,
   Youtube: **30 Video, 18 Live, 26 Short**
h. Penyusunan **1** bahan investigasi isu, meliputi:
   1) Investigasi Investigasi Isu Tambak Krimunjawa
i. Penyusunan **5** strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
   1) Strategi Komunikasi Rencana Peluncuran Satelit Nano Cakra-1 KKP
   2) Strategi Komunikasi Asian- Pacific Aquaculture (APA) 2024 dengan tema “Aquaculture - Driving The Blue Economy”
   3) Strategi Komunikasi BBI & BBWI 2024 di Maluku “Gerakkan Roda Perekonomian Menuju Maluku Mendunia”

4) Strategi Komunikasi Tahun Tuna 2024 “Empowering Blue Economy through Sustainable Indonesia Tuna Investment”
5) Strategi Komunikasi Tanggap Darurat Bencana

Dan, terkait dengan publikasi produksi video documenter, telah dilaksanakan

a. Produksi video dokumenter **Labuh Saji (Lestarikan Laut Lewat Tradisi)**
b. Produksi video dokumenter **Dialektika Penangkapan Ikan Terukur**
c. Produksi video dokumenter **Kampung Nelayan Modern Biak Numfor**
d. Produksi video dokumenter **Potensi Yellowfin Tuna Biak Numfor**
e. Produksi video dokumenter **Kompak Web Spider, Pulau Kapoposang**

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas terdapat masalah seperti:

a. Pada kegiatan produksi video dokumenter Neptune Tv, dalam persiapan tim terkadang membutuhkan waktu yang tidak menentu untuk menunggu informasi kesiapan jadwal rapat dengan tim teknis maupun tim eksternal KKP yang berkaitan dengan tema video yang akan diproduksi, lalu saat produksi juga membutuhkan waktu yang tidak menentu untuk menunggu jadwal wawancara narasumber, khususnya narasumber internal KKP.
b. Pada kegiatan penyusunan strategi komunikasi, dalam persiapan penyusunan strategi komunikasi, Tim cukup memiliki kesulitan dalam mendapatkan informasi detail terkait isu/program/update capaian dan history dari sebuah isu atau pelaksanaan program/kebijakan dari tim teknis Eselon 1 Lingkup KKP.

Namun, karena pemimpin dan jajaran anak buah yang bergerak di bidang kehumasan di Biro HKLN adalah para professional andal cerdas yang sudah berpengalaman dan teruji daya tahan, loyalitas dan dedikasinya maka tidak susah untuk merumuskan solusi taktis atau strategis yaitu:

a. Selagi menunggu konfirmasi dari tim teknis dan eksternal KKP, tim humas KKP juga mempersiapkan keproduksian untuk tema yang lain, sehingga seorang PIC bisa mempersiapkan beberapa tema sekaligus dengan menjadwalkan waktu keproduksian. Terkait wawancara narasumber internal KKP, kami selalu menentukan deadline akhir waktu wawancara, sehingga apabila hingga tenggat waktu yang ditentukan pejabat yang kami usulkan belum dapat diwawancara, kami meminta untuk dapat didisposisikan ke level Ketua Tim Kerja atau Pelaksana yang menguasai materi teknisnya.
b. Jika terjadi kesulitan mendapatkan informasi dari tim teknis melalui komunikasi whatsapp, terkadang kami mengadakan rapat koordinasi dan mengundang tim teknis terkait agar dapat diskusi bersama mengenai isu, program dan kebijakan yang akan disusun strategi komunkasinya.

Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik baru menjadi IK Biro HKLN di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan terhadap hasil IK serupa di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya. Juga, tidak dapat dilakukan pembandingan realisasi Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik triwulan II 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024). Perlu ditekankan bahwa tidak diketahui telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan terkait IKU ini.

IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	nihil	nihil	Belum

Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dimana pada Triwulan II 2024 tidak ditetapkan besar target untuk IKK ini. Sumber informasi besar nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Republik Indonesia. Besar nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

a. Pengelolaan layanan produksi; dan
b. Publikasi produksi video documenter.

Sepanjang triwulan II tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

a. monitoring media sosial dengan **5.618** data di twitter, **1.568** data di instagram, **3.132** data di facebook, **417** data di tiktok, dan **1.080** data di youtube;
b. monitoring media massa dengan **15.140** pemberitaan di media online, **130** pemberitaan di media cetak, dan **59** pemberitaan di media tv;
c. **3** kali konferensi pers
d. **1** kali Bincang Bahari
e. Rilis **19** siaran pers;
f. Produksi **5** episode podcast dan **3** episode KKP News
g. Publikasi konten di media sosial KKP, meliputi:
   Instagram, **214** konten, Tiktok, **64** konten, Twitter, **104** konten,
   Youtube: **30 Video, 18 Live, 26 Short**
h. Penyusunan **1** bahan investigasi isu, meliputi Investigasi Investigasi Isu Tambak Krimunjawa
i. Penyusunan **5** strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
   1) Strategi Komunikasi Rencana Peluncuran Satelit Nano Cakra-1 KKP
   2) Strategi Komunikasi Asian- Pacific Aquaculture (APA) 2024 dengan tema “Aquaculture - Driving The Blue Economy”
   3) Strategi Komunikasi BBI & BBWI 2024 di Maluku “Gerakkan Roda Perekonomian Menuju Maluku Mendunia”
   4) Strategi Komunikasi Tahun Tuna 2024 “Empowering Blue Economy through Sustainable Indonesia Tuna Investment”

5) Strategi Komunikasi Tanggap Darurat Bencana

Dan, terkait dengan publikasi produksi video documenter, telah dilaksanakan

a. Produksi video dokumenter **Labuh Saji (Lestarikan Laut Lewat Tradisi)**
b. Produksi video dokumenter **Dialektika Penangkapan Ikan Terukur**
c. Produksi video dokumenter **Kampung Nelayan Modern Biak Numfor**
d. Produksi video dokumenter **Potensi Yellowfin Tuna Biak Numfor**
e. Produksi video dokumenter **Kompak Web Spider, Pulau Kapoposang**

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan dijumpai masalah seperti:

a. Pada kegiatan produksi video dokumenter Neptune Tv, dalam persiapan tim terkadang membutuhkan waktu yang tidak menentu untuk menunggu informasi kesiapan jadwal rapat dengan tim teknis maupun tim eksternal KKP yang berkaitan dengan tema video yang akan diproduksi, lalu saat produksi juga membutuhkan waktu yang tidak menentu untuk menunggu jadwal wawancara narasumber, khususnya narasumber internal KKP.
b. Pada kegiatan penyusunan strategi komunikasi, dalam persiapan penyusunan strategi komunikasi, Tim cukup memiliki kesulitan dalam mendapatkan informasi detail terkait isu/program/update capaian dan history dari sebuah isu atau pelaksanaan program/kebijakan dari tim teknis Eselon 1 Lingkup KKP.

Bersyukur Biro HKLN memiliki pemimpin dan jajaran anak buah di bidang kehumasan yang merupakan sumber daya manusia professional andal cerdas yang berpengalaman dan teruji loyalitas dan dedikasinya dalam waktu yang relative lama maka mudah merumuskan solusinya, yaitu:

a. Selagi menunggu konfirmasi dari tim teknis dan eksternal KKP, tim humas KKP juga mempersiapkan keproduksian untuk tema yang lain, sehingga seorang PIC bisa mempersiapkan beberapa tema sekaligus dengan menjadwalkan waktu keproduksian. Terkait wawancara narasumber internal KKP, kami selalu menentukan deadline akhir waktu wawancara, sehingga apabila hingga tenggat waktu yang ditentukan pejabat yang kami usulkan belum dapat diwawancara, kami meminta untuk dapat didisposisikan ke level Ketua Tim Kerja atau Pelaksana yang menguasai materi teknisnya.
b. Jika terjadi kesulitan mendapatkan informasi dari tim teknis melalui komunikasi whatsapp, terkadang kami mengadakan rapat koordinasi dan mengundang tim teknis terkait agar dapat diskusi bersama mengenai isu, program dan kebijakan yang akan disusun strategi komunkasinya.

Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik baru menjadi IK Biro HKLN di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan terhadap hasil IK serupa di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya. Juga, tidak dapat dilakukan pembandingan realisasi Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik triwulan II 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024). Perlu ditekankan bahwa tidak diketahui telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan terkait IKU ini.

IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2024, belum ada baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Jadwal atau periode penghitungan IKK bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IK ini. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IK ini. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
89%	96,08%	107,95%	80%	93,84%	117,30%	nihil	nihil	nihil

Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	80%	93,84%

Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2022

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan II 2023. Oleh karena dalam data pada kedua tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa tidak ada realisasi IK Biro HKLN ini pada triwulan I tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada triwulan II tahun 2024, telah ada realisasi IK ini yaitu sebesar 96,08% dan oleh karena target IK adalah 89% maka capaiannya menjadi (96,08% / 89%) x 100% = 107,95%.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisioner oleh stakeholder sepanjang Triwulan II 2024 setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN).

Sepanjang Triwulan II 2024 telah dilakukan beberapa kali penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) pada kegiatan kunjungan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manual IK telah menentukan efektifitas layanan hubungan lembaga yaitu dengan mengacu kepada matriks di bawah ini.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Maka berdasarkan matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang antara 88,31% sampai dengan 100%. Data dukung berisi hasil survey dan berkas berisi hasil survey yang telah diolah datanya untuk mendapatkan realisasi persentase efektifitas di atas dapat dilihat dalam tautan https://bit.ly/3LqzcGk.

Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IK ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk IK ini.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK ini yang bisa ditengarai adalah:

- Pengalaman tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan selama bertahun-tahun memberikan layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dan mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi;
- Proses belajar yang tanpa henti dan kejenuhan dari tim kerja Hubungan Kemitraan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan.
- Dukungan anggaran yang memadai untuk tim Hubungan Kemitraan dalam menyediakan layanan yang prima dalam bidang hubungan kelembaga kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan;
- Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim Hubungan Kemitraan dalam berimprovisasi dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang hubungan kelembaga kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran Biro HKLN yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.

HIngga akhir Triwulan II tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IK ini kendati tidak ada kolaborasi yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN.

IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88	91,81	104,31%	80%	89,33%	111,66	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 12 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	80%	89,33%

Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan II tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah unsur
Diketahui jumlah bobot = 1 sedangkan jumlah unsur = 9 (jumlah unsur yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Bobot nilai tertimbang ditentukan oleh Perpustakaan tidak berbeda antar unsur atau merata sehingga bobot nilai tertimbang semua unsur = 1/9 = 0,11. Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai SKM = SKM x 25

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang Triwulan II 2024, terdapat 20 responden yang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 6 orang pria dan 14 orang wanita. Ke 20 responden tersebut menerima layanan yang jenisnya adalah:

- Layanan keanggotaan;
- Layanan bimbingan pemustaka; dan
- Layanan pemanfaatan ruangan perpustakaan/baca di tempat.

Tabulasi hasil pengolahan survey yang dilakukan Perpustakaan tabel dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

	Unsur								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah	72	70	70	80	69	70	71	72	76
Rata-rata	3,60	3,50	3,50	4,00	3,45	3,50	3,55	3,60	3,80
Bobot	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
Rata rata x bobot	0,40	0,39	0,39	0,44	0,38	0,39	0,39	0,40	0,42
Nilai indeks IKM	3,61								
Nilai indeks IKM x 25	90,28								

Oleh karena itu, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan II 2024 adalah 90,28.

Dengan target pada Triwulan II sebesar 88 maka capaian indikator kinerja ini adalah:

Capaian = (realisasi / target) x 100% = (90,28 / 88) x 100% = 102,59%

Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena besar Nilai Indeks SKM x 25 adalah 90,28 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100.

Raw data hasil survey dan hasil pengolahan data yang terkumpul dari survey kepuasan pelayanan Perpustakaan KKP pada Triwulan II 2024 dapat dilihat dalam tautan https://bit.ly/3zyS5Ej. Pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IKK ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk IKK ini.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK ini yang memungkinkan adalah adalah:

a. Pengalaman para pejabat fungsional Pustakawan dan pegawai perpustakaan KKP yang sudah bertahun-tahun memberikan layanan perpustakaan kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dan mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi;
b. Proses belajar yang tanpa henti dan kejenuhan dari tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan.
c. Dukungan anggaran yang memadai untuk tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam menyediakan layanan yang prima dalam bidang perpustakaan kepada *customer* perpustakaan KKP untuk literasi bidang kelautan dan perikanan;
d. Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam berimprovisasi dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para customer perpustakaan KKP; dan
e. Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran perpustakaan KKP yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.

Hingga akhir Triwulan II tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN.

IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
15%	50%	120%	50%	92%	120%	nihil	nihil	Belum

Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan II 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	50%	92%

Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

IKK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru dikenalkan Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama' dengan target di triwulan I 2024 sebesar 15%.

Pada tahun 2024, terdapat 17 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 17 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. MoU Development of Blue Economy Through Marine Affairs and Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Tanzania);
2. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Vietnam);
3. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain (kerja sama dengan negara Spanyol);
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme (kerja sama dengan negara Perancis);
5. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022 (kerja sama dengan negara Norwegia);
6. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD (kerja sama dengan North American Aerospace Defense Command (NORAD) dari negara Amerika Serikan dan Kanada);
7. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates (kerja sama dengan negara Persatuan Emirat Arab)
8. MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (kerja sama dengan negara Arab Saudi);
9. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA (kerja sama dengan negara Amerika Serikat);

10. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia (kerja sama dengan European Free Trade Association dari negara Islandia, Liechtenstein, Norwegia and Swiss);
11. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission (kerja sama dengan negara Uni Eropa);
12. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation (kerja sama dengan negara Rusia);
13. Letter Of Intent Between The Fish Quarantine And Inspection Agency Of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Of The Republic Of Indonesia And The National Fisheries Products Quality Management Service Of The Ministry Of Oceans And Fisheries Of The Republic Of Korea On The Development Of Sanitary And Phyto-Sanitary Electronic Certification (Sps E-Certification) System For Fish And Fishery Products (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
14. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok);
15. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok)
16. Implementing Arrangement for The Establishment of a Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and The Ministry of Oceans and Fisheries of The Republic of Korea (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
17. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in respect of The Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (kerja sama dengan negara Malaysia);

Hingga akhir triwulan II 2024, dari 17 dokumen kerja sama di atas 13 diantaranya telah mendapat tindak lanjut oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri baik secara langsung atau secara koordinatif. Bentuk kegiatan tindak lanjut kerja sama di atas sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan tindak lanjut MoU on Development of Blue Economy through Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Tanzania, 6 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 1);
2. Partisipasi KKP pada kegiatan "Meet Indonesia" yang digagas oleh KBRI Hanoi, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 2);
3. Kunjungan kerja dalam rangka implementasi MRA ke Spanyol, 28 Januari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 3);
4. Bilateral Meeting Dialogue ke 2 di Paris, Perancis, 14 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 4);
5. Pembahasan Kuesioner Survei Neraca Aset Moneter, arus ke ekonomi dan arus ke lingkungan dalam kerangka Ocean for Development Program, 19 Juni 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 6);

6. Rapat Pembahasan Implementasi Plan of Action for the Implementation MoU on Marine and Fisheries Cooperation antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, 22 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 7);
7. Rapat pembahasan usulan amandemen MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (tindak lanjut kerja sama nomor 8);
8. Courtesy Meeting Menteri Kelautan dan Perikanan dan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Administrator, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 9);
9. Rapat Rencana Training Program on International Fish Trade, Global Applicable Framework and Market Access, 4 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 10);
10. Rapat Persiapan Pertemuan Intersesi Working Group Trade and Sustainable Development (WG TSD) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) Isu Keanekaragaman Hayati, 7 Februari 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 11);
11. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Indonesia-Rusia Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Co-Chairs Meeting dan Russia Halal Expo 2024, 26 April 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 12);
12. Pembahasan Indikator Monitoring dan Rencana Monitoring Sosial Ekonomi Rig to Reef, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 16); dan
13. Rapat Persiapan Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak Menangkap Ikan di Perairan Negara Lain Tanpa Izin di Provinsi Sumatera Utara, 22 Maret 2024 (tindak lanjut kerja sama nomor 17)

Oleh karena itu, berdasarkan formula berikut:

%KS Bilateral = (Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti/Jumlah dokumen KS yang aktif) x 100%

Keterangan:
- Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang merupakan hasil tindak lanjut dokumen kerja sama bilateral yang aktif.
- Jumlah dokumen kerja sama yang aktif adalah dokumen kerja sama bilateral yang masih berlaku dan direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2024.

maka realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' hingga akhir triwulan II 2024 adalah:

realisasi % KS Bilateral = (13 / 17) x 100% = 76,47%

Target indikator kinerja ini pada triwulan II 2024 adalah 35% maka capaian adalah:

(realisasi / target) x 100% = (76,47% / 35%) x 100% = 218,48%

Berdasarkan penghitungan aplikasi kinerjaku, nilai capaian yang lebih besar daripada 120% akan otomatis dihitung menjadi 120%. Dokumen yang berisi informasi yang lebih lengkap seperti daftar dan jadwal kegiatan tindak lanjut kerja sama bilateral sepanjang triwulan II 2024 dan tautan data dukung dokumen tindak lanjut dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/3y5WPkk pada *sheet* 'IK Bilateral'.

Realisasi IK ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dirasa belumlah tepat oleh karena realisasi dan capaian baru sampai dengan akhir triwulan II 2024. Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan

pembandingan. Pencapaian target IK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena sangat dipercaya kalau sepanjang triwulan II tahunj 2024 tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88%	88,89%	101,01%	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Belum

Tabel 16 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan II tahun 2024, telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP. Hal ini dikarenakan penghitungan IK di tahun 2024 bersifat triwulanan. Akan tetapi pada triwulan yang sama di tahun 2023, belum ada hasil penghitungan IKK ini karena Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2023 dan di tahun 2023 frekuensi penghitungannya masih bersifat tahunan.

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah angka atau besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan I 2024. Untuk mengetahui persentase kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online pada triwulan I 2024 memakai aplikasi google forms survey.

Daftar pertanyaan yang disampaikan dalam kuisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan
9. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Hasil pengolahan atas persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP periode triwulan II 2024 adalah sebesar 88,89%. Hasil ini diperoleh dari 9 orang responden yang mengisi dan menyerahkan kuisioner secara *online*. Oleh karena target Indikator Kinerja ini di triwulan II 2024 sebesar 88% maka capaian Indikator Kinerja ini sebesar:

Capaian = (realisasi / Target) x 100% = (88,89% / 88%) x 100% = 101,01%

Kuisioner juga menghimpun umpan balik dari para responden dalam bentuk masukan guna perbaikan dan apresiasi layanan perjalanan dinas luar negeri oleh Biro HKLN. Beberapa respon dari responden diantaranya:

- Secara umum sudah cukup baik;
- Lebih sering mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi pelaksana/PIC PDLN lingkup KKP;
- Semakin mempermudah dan efekif;
- Pelayanan sudah sangat baik.. mungkin perlu dibuatkan platform untu memudahkan tracking proses perizinan;
- Mohon agar standby lama, jika perlu 24 jam.

Apabila mengacu kepada tabel di bawah ini yang diambil dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka dengan realisasi sebesar 88,89%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP pada periode triwulan II 2024 adalah sangat baik atau berkinerja sangat baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Data mentah dan hasil pengolahan terhadap survey kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP dapat dilihat dalam tautan https://bit.ly/4bLqg9h.

Berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IKK ini. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi admin PDLN pada triwulan II 2024 adalah:

1. Pemberian layanan seprima mungkin (berpatokan kepada peraturan yang berlaku) pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Pemberian layanan pengurusan paspor dinas; dan
3. Pemberian layanan pengurusan visa.

IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
35%	37,14%	106,11%	50%	36,36%	72,72%	nihil	nihil	Belum

Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	50%	36,36%

Tabel 19 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Besar target Indikator Kinerja ini di triwulan II 2024 adalah 35%.

Realisasi kegiatan kerja sama luar negeri ruang lingkup regional dan multilateral oleh Biro HKLN sepanjang triwulan II 2024 adalah sebagai berikut:

Daftar rencana kegiatan forum internasional kerja sama ASEAN, Intrakawasan dan PBB sepanjang tahun 2024 dimana posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan akan diajukan ke dalam forum tersebut dengan tujuan untuk diterima adalah:

A. Kerja sama ASEAN

1. Pertemuan ASWGFi ke-32
2. Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-16
3. Pertemuan ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ke-31 (30th ASEAN JCM)
4. SEAFDEC SCM ke-56
5. SEAFDEC PCM ke-47
6. FCG/ASSP ke-27
7. BIMP-EAGA (WG on Fisheries) ke-11
8. The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission
9. The 31st Annual Meeting of CCSBT
10. Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17
11. The 21st Regular Session of the WCPFC
12. Penyusunan ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers
13. RPOA IUU CCM

B. Kerja Sama Intrakawasan

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22

3. Pedoman Delri/Kerpos SGOM ATSEA-2
4. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG Ke-23
5. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum IORA WGBE
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024
7. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9
8. RSC 6 ATSEA-2
9. Pedoman Delri/Kerpos MM ATSEA-2
10. Pedoman Delri/Kerpos Pre-SOM/SOM ke-19
11. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen IORA guideline IUUF
12. Pedoman Delri/Kerpos Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan

C. Kerja Sama PBB

1. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management
2. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD- 11) di Bangkok, Thailand
4. Sidkom 80
5. Regional Ocean Dialogue
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 36th FAO COFI
7. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum COP 29 UNFCCC
8. CITES 33rd Animals Committee Meeting
9. SOM AIS
10. Dokumen Proposal Project GEF 8 disampaikan kepada GEF

Oleh karena itu, berdasarkan 3 (tiga) daftar di atas, terdapat 35 kegiatan forum internasional Kerja Sama Regional (KSR), Kerja Sama Intrakawasan (KSI) dan Kerja Sama PBB (KSPBB) sepanjang 2024.

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari tim kerja kerja sama multilateral Biro HKLN, hingga akhir Juni 2024, terdapat 13 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Ke-13 kegiatan tersebut:

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9 (KSI), 12 Januari 2024;
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22 (KSI), 22 Februari 2024;
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024 (KSI), 29 Januari 2024;
4. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9 (KSI), 7 Maret 2024;
5. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management (KSPBB), 15 Januari 2024;
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters (KSPBB), 8 Januari 2024;
7. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD-11) di Bangkok, Thailand (KSPBB), 20 Februari 2024;

8. Tersusunnya pedoman Delri untuk Sidkom 80 (KSPBB), 22 April 2024;
9. SEAFDEC SCM ke-56 (KSR), 6 Mei 2024;
10. The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission (KSR), 13 Mei 2024;
11. Tersusunnya pedoman Delri/Kertas Posisi untuk Pedoman SGOM ATSEA-2 (KSI);
12. Tersusunnya bahan/dokumen IORA guideline IUUF (KSI), 2 Mei 2024;
13. Penyampaian Concept Notes pada Proyek APEC Session I OFWG 101 2024A - Promoting Decision Support System (DSS) Using Digital Data to Support Small Pelagic Fisheries Management in the APEC Region (KSI), 18 Maret 2024.

Berdasarkan manual indikator kinerja, realisasi indikator kinerja pada triwulan I 2024 dihitung sebagai berikut

Realisasi %KS Regional dan Multilateral =

(Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional /Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan) x 100%

Maka, realisasi pada triwulan I 2024 = (13 / 35) x 100% = 37,14%

Target IKK di Triwulan I 2024= 35%

Capaian = (Realisasi / Target) x 100% = (37,14% / 35%) x 100% = 106,11%

Raw data atau data dukung serta informasi detail terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional triwulan I 2024 dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/3S9gCq1 pada sheet 'IK PosisiRekomendasi'. Realisasi IK ini jelas memenuhi target dengan indikator kuantitas yaitu dengan capaian di atas 100%. Faktor penyebab keberhasilan pemenuhan target adalah tidak terjadinya lagi kekurangtelitian dalam pemecahan target IK mulai triwulan I sampai triwulan IV 2024. Oleh karena itu, dibandingkan dengan realisasi dan capaian untuk IK yang sama di periode triwulan II 2023, terjadi kenaikan realisasi dan capaian.

Akan tetapi, IK ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/KepSJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IK ini. IK ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan pembandingan. Pencapaian target IKK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena itu tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
30%	33,33%	111,10%	8%	8,33%	104,13%	nihil	nihil	Belum

Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	8%	8,33%

Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN sejak triwulan II 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Tidak ada ditetapkan besar target untuk IK untuk tahun-tahun sebelum atau periode triwulan sebelum triwulan II tahun 2023.

Pada tanggal 14-15 Mei 2024 bertempat di Pulau Bali, Indonesia, telah diselenggarakan ASEAN-Australia Indo-Pacific Workshop on the Use of Technology for Sustainable Aquaculture. Kegiatan dalam kerangka Kerja Sama Regional ini berawal dari inisiasi Kementerian Luar Negeri sebagai implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo Pacific, dengan dukungan Pemerintah Australia. CN telah telah disahkan di AMAF. Tentu saja dala kesempatan ini Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkesempatan mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum workshop internasional yang bergengsi ini.

Agenda kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, dengan agenda hari pertama difokuskan untuk *full class activity*, sedangkan hari kedua adalah praktik lapangan dalam bentuk *field trip* ke lokasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau lokasi lain yang terkait dengan perikanan (terkait dengan isu Digitalisasi Teknologi Perikanan) dilengkapi dengan aktivitas *lunch* dan *cultural performance* serta *excursion*.

Target peserta kegiatan ini adalah pemangku kepentingan di sektor perikanan budidaya di ASEAN. Kementerian Luar Negeri mengidentifikasi bahwa diperkirakan ada kegiatan KKP yang mengundang peserta dari negara ASEAN yang dapat disinergikan dengan workshop ASEAN-Australia. Peserta dari negara-negara Forum Pasifik diberikan pembiayaan dari Australia, sedangkan peserta ASEAN dengan pembiayaan masing-masing. Kegiatan dibiayai sebagian besar oleh Pemerintah Australia dengan *co-sharing* dari pemerintah Republik Indonesia (Kemlu dan KKP) yang diharapkan mendukung untuk pembiayaan seperti paket meeting, field trip, jamuan makan, rapat persipan, souvenir, transportasi lokal, dan perjalanan tim pelaksana dari Biro HKLN.

Sepanjang triwulan II tahun 2024, tidak ada lagi kegiatan pertemuan dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral dalam bidang atau sektor kelautan dan perikanan selain di atas dimana delegasi dari KKP menjadi pemimpinnya, atau dengan kata lain jumlah pertemuan/pencalonan di luar rencana adalah 0 (nol).

Berdasarkan manual indikator kinerja, maka realisasi indikator kinerja pada triwulan II 2024 dihitung sebagai berikut

Realisasi % kepemimpinan Indonesia di forum regional dan multilateral bidang KP =

% Kepemimpinan = (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia) + (Jumlah pertemuan/ pencalonan di luar rencana) / Rencana jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia x 100%

Maka, realisasi pada triwulan II 2024 = ((1) + (0) / 3)) x 100% = (1/3) x 100% = 33,33%

Target IKU ini di Triwulan II 2024= 30%

Capaian = (Realisasi / Target) x 100% = (33,33% / 30%) x 100% = 111,11%

Raw data atau data dukung serta informasi terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional triwulan II 2024 dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/4dkNy7h.

IK 10 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan II 2023			Triwulan II 2022			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 22 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana tercantum dalam di atas, untuk triwulan I tahun 2023 belum ada hasil realisasi dari pengukuran IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada triwulan I Tahun 2023. Begitu juga dengan capaiannya karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target yang ditetapkan untuk triwulan I.

Pengukuran IK ini bersifat tahunan, sama seperti tahun/tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini yang menjelaskan di triwulan I tahun 2022 juga tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama. Meskipun belum ada realisasi dan capaian karena merupakan IKU tahunan, dalam laporan ini tetap disampaikan kondisi agar Biro HKLN dalam kondisi siap sedia untuk menyelesaikan laporan temuan BPK yang mungkin baru muncul di triwulan II atau III atau IV tahun 2023. Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia

IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja ini belum tersedia di Triwulan I tahun 2024. Demikian juga dengan targetnya, sehingga capaian IKK ini di triwulan I 2023 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2023 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan.

Oleh karena semakin mendekatnya waktu pelaksanaan pengukuran Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Biro Perencanaan, maka pada triwulan-triwulan berikutnya di tahun 2023 dapat direkomendasikan dan dilaksanakan pengintensifan koordinasi internal Biro HKLN dalam rangka melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi serta menjalin kerja sama yang baik dengan Biro Perencanaan dan bersinergi dengan semua pihak dalam menyediakan solusi apabila ditemukan isu dan masalah yang menghambat proses bisnis pencapaian target kinerja ini. Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2024.

IK 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
80	81,68	102,10%	72	65,16	90,50%	100%	Nihil	81,68%

Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	72	65,16

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di KKP diungkapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pemerintah (Biro SDMAOP) melalui Nota Dinas Kepala Biro SDMAOP Nomor : 1132/SJ.3/TU.140/VII/2024/SJ.2/TU.210/III/2017 tanggal 12 Juli 2024 hal 'Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan II Semester I Tahun 2024'. Capaian Pengukuran IP ASN KKP yang dilakukan secara mandiri dengan pengambilan data yaitu

1. Kualifikasi/Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan dari Aplikasi e-Pegawai KKP;
2. Kompetensi (Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar) dari Aplikasi SIASN BKN;
3. Kinerja atau SKP dari Aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN; dan
4. Displin atau SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Aplikasi e-Pegawai KKP.

Sesuai dengan informasi tersaji dalam tabel di atas, IK ini telah memiliki realisasi untuk Biro HKLN pada periode triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 81,68 sehingga melampaui target yang hanya sebesar 80 sehingga capaiannya menjadi 102,10%. Target akhir tahun IK ini adalah 85.

Komponen IP ASN Biro HKLN dan besar indeksnya adalah sebagai berikut:
Kualifikasi : 21,38
Kompetensi : 28,15
Kinerja : 27,14
Disiplin : 5

Tidak ada standar nasional yang bisa dirujuk Biro HKLN sebagai pembanding dalam kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Perlu disampaikan bahwa nihil informasi resmi adanya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan pencapaian target IK ini sepanjang periode triwulan II 2024.

IK 13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
94%	116,67%	120,00%	92%	100%	108,70%	100%	nihil	116,67%

Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan II 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	92%	100%

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Target, realisasi dan capaian atas IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada triwulan I tahun 2024 dan progress kinerja IKK ini jika dibandingkan dengan perolehan kinerja di tahun sebelumnya dapat dilihat pada kedua tabel di atas. Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal yang notabene merupakan penanggung jawab penghitungan IK ini di KKP, untuk triwulan II tahun 2024 ditetapkan targetnya sebesar 94%. Hasil penghitungan yang diumumkan Pusat Data, Statistik dan Informasi menunjukkan bahwa Biro HKLN berhasil meraih realisasi sebesar 116,67%. Dengan realisasi tersebut maka capaian dihitung oleh aplikasi kinerjaku menjadi 120,00%. Hal ini berarti bahwa kinerja Biro HKLN melampaui target Triwulan II tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, target renstra untuk indikator kinerja ini adalah 100% dan jika mengacu kepada target tersebut, Biro HKLN tidak menemui kesulitan untuk memenuhinya.

IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional. Perolehan realisasi dan capaian Biro HKLN untuk nilai IK ini pada tahun triwulan II 2024 di lingkup Sekretariat JJenderal memosisikan Biro HKLN sebagai salah satu unit kerja dengan performa baik. Kondisi ini hendaknya tetap memotivasi Biro HKLN untuk mempertahankan etos kerja triwulan-triwulan berikutnya sehingga selalu memperoleh nilai 100% dan peringkatnya Kembali kepada yang terbaik atau masuk ke kelompok terbaik. Tidak diketahui adanya berita resmi terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini sepanjang periode triwulan II 2024.

IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
85,72%	100%	85,72%	75%	75%	100%	80%	nihil	107,15%

Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	75%	75%

Tabel 31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada Triwulan II tahun 2024 adalah 85,72%. Target di triwulan II tahun 2024 untuk indikator kinerja ini adalah 100% maka capaian IK ini di triwulan II tahun 2024 menjadi 85,72%. Hal yang serupa berlaku pada periode triwulan II tahun 2023 dimana realisasi indikator kinerja yang sama adalah 75% dengan target sebesar 75% sehingga besar capaiannya adalah 100%. Target indikator kinerja ini di tahun terakhir yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah 80% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 107,15%.

Realisasi indikator kinerja ini adalah berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Memorandum Kepala Biro Keuangan nomor 2137/SJ.2/HP.510/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan II Tahun 2024. Dalam memorandum tersebut diterangkan bahwa terdapat 7 rekomendasi untuk Biro HKLN pada Triwulan II tahun 2024 dan 6 diantaranya telah tuntas ditindak lanjut sehingga persentase rekomendasi sebesar 85,72%. Di dalam memorandum tersebut, tidak ada informasi lainnya yang bisa menjelaskan lebih detail mengenai realisasi Indikator Kinerja ini oleh Biro HKLN. Dengan demikian, hanya berita tersebut yang menjadi analisis atas kondisi Biro HKLN yang tidak berhasil memenuhi target Indikator Kinerja ini untuk periode Triwulan II tahun 2024. Meskipun begitu, yang terpenting adalah nilai kinerja organisasi Biro HKLN mencapai angka 105,81 pada periode Triwulan II tahun 2024 maka diyakini secara quantitatif, tiada pengaruh signifikan dari hasil Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terhadap performa Biro HKLN secara keseluruhan selama triwulan II tahun 2024.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Tidak termonitor adanya indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan II 2024.

IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan II 2024			Triwulan II 2024			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 32 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, besar target Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN pada periode Triwulan II 2024 tidak ditetapkan. Namun, yang informasi terkait besar penyerapan anggaran sampai akhir Triwulan II 2024 yang bisa dihadirkan dalam laporan kinerja ini secara garis besar terangkum dalam matriks di bawah ini, sehingga bisa diketahui kalau penyerapan oleh Biro HKLN adalah 21,56%.

Kelompok Kerja	Pagu	Realisasi Jan - Jun	% Realisasi Jan - Jun
Kerja Sama Bilateral	3.300.000.000	1.525.668.130	46,23%
Kerja Sama Multilateral	4.200.000.000	847.016.565	20,17%
Pemberitaan dan Opini Publik	2.973.962.000	1.490.365.850	50,11%
Layanan Informasi	877.877.000	362.052.765	41,24%
Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	6.306.373.000	176.981.958	2,81%
Tata Usaha	1.696.363.000	788.002.481	46,45%
Pemberitaan dan Opini Publik	6.573.361.000	628.781.114	9,57%
Layanan Informasi	700.747.000	64.105.251	9,15%
Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	956.090.000	21.548.250	2,25%
Layanan Perkantoran	4.486.550.000	1.522.633.371	33,94%
Video Dokumenter	5.148.000.000	597.013.500	11,60%
Jumlah	**37.219.323.000**	**8.024.169.235**	**21,56%**

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan II 2024 karena pada kenyataannya tidak ada berita laporan atau berita resminya.

IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	nihil	nihil	Belum

Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan II Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan II tahun 2024, belum ada baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Hal ini dikarenakan penghitungan IKK yang bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IKK ini. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IKK ini. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

Kemungkinan, langkah yang sudah dilakukan triwulan II tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan indikator kinerja ini adalah pelaksanaan rapat atau pertemuan informal untuk pematangan konsep dokumen legal. Dan jika kegiatan tersebut ada dilaksanakan, sangat diyakini meliabatkan pejabat dan staf dari Biro Hukum KKP atau setidaknya pegawai KKP yang sudah menjadi sarjana hukum.

IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Mendapatkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Triwulan II 2024			Triwulan II 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
nihil			nihil			nihil	nihil	Belum

Tabel 36 Realisasi dan Capakan IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Triwulan II 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tw II 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan II tahun 2024, belum tersedia baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini dikarenakan penghitungan IK bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IKK ini karena hasil Indikator Kinerja ini baru ada di akhir tahun 2023. Berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IK ini. Pada tataran nasional tidak tersedia standar dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding atau sebagai rujukan. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia. Kegiatan yang dirampungkan pada triwulan II 2024 diantaranya adalah:

5. mendapatkan wejangan dari pakar WBK dari Inspektorat Jenderal;
6. tanda tangan bersama pegawai Biro HKLN pada backdrop “Gak WBK Gak Kece”; dan
7. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari 17 IK tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2024, IK yang pada triwulan II 2024 telah memiliki realisasi adalah sebagai berikut (dilengkapi kode IKU berdasarkan aplikasi kinerjaku):
   a. IKSK.04, Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 94,44%. Target IK ini adalah 89% maka capaiannya menjadi 106,11%;
   b. IKSK.05, Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi IKU sebesar 91,81% dengan besar target yaitu 88%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 104,33%;
   c. IKSK.06, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 15%, realisasi 50,00% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerjaku menjadi 120%;
   d. IKSK.07, Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 88,61% sehingga capaiannya adalah 100,69%;
   e. IKSK.08, Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidan kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 15%, realisasi 22,86%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku adalah 120%;
   f. IKSK.09, Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan. Besar target yaitu 30% dan realisasinya 33,33%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 111,10%;
   g. IKSK.12, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, memperoleh realisasi sebesar 81,68. Dengan target sebesar 80 maka capaian Indikator Kinerja ini adalah 102,10%;
   h. IKSK.13, Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, realisasinya sebesar 133%. Dengan target IKU sebesar 94% maka aplikasi kinerjaku menghitung capaian untuk IK ini sebesar 120%, dan
   i. IKSK.16, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100 %. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 100% sehingga capaiannya menjadi 100%.
2. Pemenuhan target Indikator Kinerja Biro HKLN di triwulan II 2024 diyakini telah melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP yang dialokasikan untuk Biro HKLN dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Saran

In the first place, nilai kinerja Biro HKLN pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 105,81 yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat predikat baik. Maka, menurut hemat kami, tidak perlu dirumuskan saran untuk periode mendatang karena berpotensi menjadikan predikat tersebut *meaningless*.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Prabowo
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Rudy Heriyanto Adi Nugroho	Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	96,9
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	93,3
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	94
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (persen)	89
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (persen)	95
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (persen)	93
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP (persen)	88
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (persen)	100
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	84
		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	85
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		13	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	95
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (persen)	100
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	29.986.550.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024		37.486.550.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo